

Menciptakan kebijakan terkait sistem peradilan pidana Indonesia yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana menciptakan sistem peradilan pidana yang bebas korupsi, adil dan efisien

Isu Strategis 1



Yuk kita simak!





CAPAIAN

A. Riset Berbasis Bukti yang Kuat dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Hukum dan Pidana di Indonesia

**Apa aja sih Riset IJRS dan apa dampaknya?
Yuk cek di slide selanjutnya!**



APA SIH DAMPAKNYA?

01

Memperkenalkan Indeks Akses Keadilan pada pemerintah Indonesia



- Berpengaruh terhadap penyusunan **Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021**
- Menjadi pertimbangan indikator dalam Modul Hansos-Susenas oleh BPS
- Menjadi **acuan indikator nasional** dalam SDGs 16.3

02

Mengembangkan Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan



Alat ukur survei ini oleh BPHN dijadikan **acuan** untuk pelaksanaan evaluasi organisasi bantuan hukum di Indonesia.

03

Menyusun kebijakan Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik



Diharapkan dapat memudahkan para penuntut umum memasukkan indikator yang beralasan serta terukur untuk menentukan klasifikasi pengguna / pengedar / pecandu / korban penyalah guna agar menghindari multitafsir.

04

Terlibat dalam riset penyusunan kebijakan terkait penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia



- Dapat dijadikan rujukan utama bagi stakeholders untuk menyusun kebijakan pidana yang berprinsip keadilan restoratif.
- Menjadi bahan advokasi untuk membuka diskusi strategis terkait keadilan restoratif di antara kementerian

05

Terlibat dalam penelitian Kajian implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di 5 (lima) wilayah di Indonesia



Mendorong implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, salah satunya dengan **mengadakan sosialisasi dan pelatihan** yang berkelanjutan serta lebih luas kepada Hakim di seluruh Indonesia.

06

Terlibat dalam penelitian persepsi dan dukungan terhadap pengaturan kekerasan seksual dan isu perkawinan anak



Hasil survei ini diaudiansikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Kantor Staf Presiden RI, hingga Komnas Perempuan **sebagai bahan masukan RUU TPKS yang kini sudah disahkan menjadi UU.**

07

Terlibat dalam penelitian terkait tata kelola pemerintahan di sektor penegakan hukum



Menjadi **laporan penelitian untuk Bappenas RI dalam memetakan permasalahan tata kelola kebijakan hukum pidana**, bahkan penelitian ini sudah **dipublikasikan menjadi buku** oleh Bappenas pada akhir 2021 lalu.

08

Terlibat dalam advokasi berbasis riset mengenai penerapan Pro Bono di Indonesia.



IJRS mengembangkan website E-Probono yang **diharapkan dapat memicu budaya pro bono dan meningkatkan akses terhadap bantuan hukum melalui pro bono.**

09

Melakukan penelitian dengan metode analisis atau indeksasi putusan pengadilan di berbagai isu sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kebijakan



Penelitian ini dilakukan dalam berbagai macam isu seperti kekerasan seksual, kebijakan narkoba, dan hukuman mati. Diharapkan dapat **menjadi rujukan, acuan, dan alat pendeteksi kasus rawan, seperti hukuman mati.**

CAPAIAN

B. Diseminasi Data Penelitian IJRS

1 Menampilkan hasil data – data riset IJRS dalam berbagai bentuk dan platform / saluran media sosial.

2 Bekerjasama dengan beberapa vendor pembuatan jasa video.

3 Pengembangan situs portal data yang berjudul KataHukum dengan promosi di media sosial melalui #ApaKataHukum.

Portal KataHukum nantinya dapat menjadi capaian bagi **implementasi RENAksi OGI 2020- 2022** sekaligus mendorong akses informasi yang terbuka untuk **mendorong akses keadilan seluas luasnya.**



CAPAIAN

C. Mendorong Perubahan Kebijakan Pidana melalui Legislasi serta Berjejaring dengan Koalisi

01
Berkoalisi dengan koalisi masyarakat sipil untuk **reformasi KUHP**, termasuk berkoalisi dengan **konsorsium masyarakat sipil untuk keadilan restoratif** bersama ICJR dan LeIP.

02
Terlibat aktif dalam kegiatan bersama berbagai **koalisi seperti Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan, Koalisi Pemantau Peradilan, dll.**

03
Terlibat aktif dalam **penyusunan kajian dan advokasi perumusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)** bersama koalisi masyarakat sipil.

RUU TPKS bahkan berhasil disahkan menjadi UU TPKS





Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,
Share dulu biar
banyak orang tahu!



www.ijrs.or.id